



Panwaslu Yogya Proses Tiga PPK Diduga Langgar Kode Etik

● YULIANINGSIH

YOGYAKARTA — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta, DIY, saat ini tengah memproses tiga Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Yogyakarta 2017 kemarin. Hal itu disebabkan tiga PPK ini diindikasikan melanggar kode etik dalam pelaksanaan Pilwakot kemarin. Bahkan Panwaslu Kota Yogyakarta melaporkan temuan indikasi tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Panwas Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin mengatakan, ketiga PPK yang diindikasikan melanggar kode etik ini adalah PPK Umbulharjo, PPK Danurejan, dan PPK Gondokusuman. Menurutnya, pelanggaran kode etik itu karena ketiga PPK tersebut tidak mengindahkan rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas-

cam) untuk membuka kotak suara di salah satu kelurahan dari masing-masing kecamatan itu seperti yang direkomendasikan Panwascam.

Diakuinya, pihaknya sudah melaporkan indikasi pelanggaran kode etik pengawasan Pemilu tersebut ke DKPP. "Terbukti atau tidaknya nanti biar DKPP yang memutuskan," ujarnya, Rabu (15/3).

Dikatakan Agus, pihaknya sudah memanggil pihak-pihak terkait dalam laporan dugaan pelanggaran etik PPK tersebut. Meski begitu kata dia, pihaknya tidak bisa memutuskan terkait indikasi pelanggaran tersebut karena hal itu menjadi kewenangan DKPP.

Sementara Ketua PPK Umbulharjo, Suwendro mengaku sudah memberikan keterangan kepada Panwas Kota dalam kasus tersebut. Menurutnya, semua anggota PPK Umbulharjo sepakat tidak membuka kotak

suara seperti yang diminta Panwascam karena permintaan itu bukan diungkapkan dalam forum rekapitulasi suara, melainkan saat di ruang camat.

Saat proses rekapitulasi, kata dia, juga dihadiri komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota, komisioner KPU DIY, dan Panwas Kota. Yang dia ketahui sesuai aturan dari KPU, pihaknya hanya membacakan form G1 dan menuliskannya dalam plano. Selama tidak ada perbedaan angka dari C1 KPPS dan saksi tidak perlu membuka kotak suara. "Kami tidak masalah dilaporkan ke DKPP. Saya menunggu intruksi dari KPU saja harus menyiapkan apa," katanya.

Terpisah, Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budianto, mengatakan belum mendapat surat pemberitahuan dari DKPP terkait laporan Panwaslu Yogya tersebut. "Kami akan siapkan klarifikasi sesuai aturan yang ada," ujarnya. ■ ed: fernal rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005